



KETERBATASAN ANGGARAN JADI KENDALA 2021, Ditarget Terpentak 1.200 Jaga Warga

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berupaya melakukan pendampingan kepada Satuan tugas (Satgas) Padukuhan alias Jaga Warga yang ditargetkan bisa terbentuk sebanyak 1.200 kelompok hingga akhir 2021. Sebab, Satgas Padukuhan di DIY yang terbentuk belum mencapai 50 persen karena keterbatasan atau minimnya anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dari APBDes.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya mendorong dan melakukan pendampingan kepada 84 kelompok Jaga Warga yang ada di bawah koordinasi Satpol PP DIY. Hingga akhir tahun ini ditargetkan terbentuk 1.200 kelompok Jaga Warga.

"Jaga Warga levelnya tingkat Padukuhan, kecuali di Kota Yogyakarta yang levelnya Kampung dan Kelurahan Wates Kulonprogo berada di tingkat RW. Jadi, kami mendorong dari Jaga Warga ini segera membentuk posko-posko di tingkat Padukuhan yang saat ini masih belum mencapai 50 persen," paparnya di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Jumat (11/6).

Noviar menyampaikan, Satpol PP DIY telah memberikan pendampingan kelompok Jaga Warga di Gu-

nungkidul, Bantul serta sebagian di Sleman dan Kulonprogo. Sehingga pihaknya belum menuntaskan pendampingan dan pembentukan Jaga Warga di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di DIY. Kendalanya adalah faktor kecilnya biaya karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa hanya sebesar 8 persen dari APBDes.

"Bisa dibayangkan jika APBDesnya hanya Rp 1 miliar maka anggaran penanganannya hanya Rp 80 juta dalam jangka waktu satu tahun yang dibagi 12 bulan untuk penanganan, pembinaan, biaya shelter dan sebagainya. Jadi anggarannya sangat tidak ideal itulah kendalanya, karena Jaga Warga ini adalah partisipasi masyarakat maka kami mendorong partisipasi masyarakat untuk anggaran fasilitasi yang kita harapkan," terangnya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol DIY, Dewa Isnur Broto menyatakan, meningkatnya jumlah kasus dan klaster baru dalam beberapa waktu terakhir membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya penyebaran yang semakin banyak dan masif serta penularannya sudah di forum kegiatan masya-

rakat seperti hajatan, kedisiplinan penegakkan Prokes perlu lebih ditekankan.

"Keberadaan Jaga Warga, Linmas atau Satgas di level RT/RW perlu lebih dioptimalkan lagi. Untuk itu pemerintah desa harus mencoba melakukan pembiayaan terhadap konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan di Satgas Covid ditingkat desa. Adapun untuk pembiayaan atau alokasi anggarannya bisa menggunakan APBDes," kata Dewa Isnur Broto.

Dewa mengatakan, guna mengantisipasi adanya penambahan kasus atau klaster baru, idealnya pemerintah desa sudah mulai menegatkan lagi kebijakan terkait protokol Covid serta monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Konsekuensi dari itu pengaturan untuk kegiatan hajatan akan lebih diperketat. Dengan adanya pengetatan itu diharapkan terjadinya kerumunan yang bisa memicu terjadinya penularan akan bisa ditekan.

"Covid-19 itu benar-benar ada, jadi masyarakat harus menegakkan Prokes dalam setiap aktivitasnya. Karena hanya dengan cara itu penularan kasus bisa dicegah," ujarnya. (Ira/Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005